

ABSTRAK

Tesis berjudul “**PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH BAGI PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**”, yang diteliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Tesis ini membahas karakter dan konsep keadilan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Selain itu dalam tesis ini juga membahas mengenai dasar-dasar penetapan tarif retribusi berdasarkan perundang-undangan, baik dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Peraturan Daerah Kota Surabaya yang mengatur secara khusus mengenai perhitungan tarifnya. Untuk mendapatkan pemahaman lebih sempurna, penelitian ini terlebih dahulu membahas mengenai konsep-konsep keadilan dan latarbelakang dikenakan retribusi daerah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa prinsip keadilan yang diterapkan oleh petugas di lapanganlah yang menjadikan tujuan dikenakannya retribusi daerah yang dipungut kepada pemegang IPT menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu diharapkan adanya koordinasi dan komunikasi untuk menerjemahkan ketentuan dalam perundangan tersebut sehingga dapat mewujudkan tujuan retribusi daerah..

Kata Kunci : Prinsip Keadilan, Retribusi Daerah, Izin Pemakaian Tanah.

ABSTRACT

This thesis titled "PRINCIPLES OF JUSTICE IN THE DETERMINATION OF TARIFFS FOR LAND USE LEVIES FOR HOLDERS OF LAND USE PERMITS IN THE SURABAYA GOVERNMENT MANAGEMENT RIGHT ", which is examined using a normative juridical method with a Statute Approach and Conceptual Approach. This thesis discusses the character and concept of justice based on the theories put forward by experts. In addition, this thesis also discusses the basics of determining tariffs based on legislation, both from the Regional Tax Law and Regional Retribution as well as the Surabaya City Regional Regulation that specifically regulates the calculation of tariffs. To get a more perfect understanding, this study first discusses the concepts of justice and background subject to local user fees. The results of this study stated that the principle of justice applied by officers in the field made the purpose of imposing regional levies collected on IPT holders to cause disputes. Therefore, it is expected that there will be coordination and communication to translate the provisions in the legislation so that it can realize the purpose of regional retribution.

Key word : Principle of Justice, Regional Retribution, Land Use Permit